MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 219/DJMT/KP7.1/VIII/2023

Menimbang : Dalam rangka rencana pelaksanaan Pelatihan Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 diperlukan Penyusunan dan Pengembangan RBPP dan RBPMP Pelatihan Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer seluruh Indonesia.

Dasar : Surat Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 1371/Bld.3/Dik/S/8/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Undangan Penyusunan RBPP dan RBPMP Pelatihan Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Peradilan Militer seluruh Indonesia.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Mayor Chk K. G. Raegen, S.H./ 11070053480285, Hakim Yustisial pada Ditbinganisminmil;
2. Kapten Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H./ 21990050480178, BP pada Ditbinganisminmil.

Untuk : Mengikuti kegiatan Penyusunan RBPP dan RBPMP Pelatihan Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Peradilan Militer seluruh Indonesia bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jl. Hayam Wuruk No. 36-37, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta pada tanggal 21 sd. 24 Agustus 2023;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"